



PENGARUH KOMPONEN ASET DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP BEBAN PAJAK KINI MASA DEPAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2011)

**Reny Kartika Sari
Zulaikha¹**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the components of deferred tax assets and liabilities for future current tax over a three-year period ($t+1$, $t+2$, $t+3$). Deferred tax assets and liabilities arising from timing differences in the recognition of revenues and expenses based on financial accounting standards and tax laws. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are recognized in the financial statements because it can lead to future tax payments to be larger or smaller. Sample of this study consists of 88 companies from manufacturing sectors listed on Indonesia Stock Exchange in 2005-2011. Multiple regression analysis is used to determine the effect of each component of deferred tax assets and liabilities for future current tax. The results show that deferred tax assets of post-employment benefits has negatively significant and deferred tax liabilities of accelerated depreciation has positively significant to future current tax. While the results for the deferred tax assets of accrued expenses do not affect future current tax. Future taxes paid related to the time reversal of deferred tax assets and liabilities. Accrued expenses may not be realized over a three-year period, so the deferred tax assets do not reverse.

Keywords: income tax, current tax, deferred tax assets and liabilities, PSAK 46.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, kebutuhan akan informasi keuangan semakin meningkat. Para pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditur menggunakan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan mereka. Pada umumnya terdapat dua jenis laporan keuangan yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Menurut Resmi (2011), laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditujukan untuk menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan. Basis penghitungan penghasilan sebelum pajak komersial berbeda dengan basis penghitungan penghasilan kena pajak berdasarkan fiskal, sehingga terdapat perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya dari kedua basis tersebut. Perbedaan dikelompokkan menjadi perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan temporer (*temporary differences*).

Perbedaan permanen adalah perbedaan ketentuan antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan, sehingga tidak akan menimbulkan dampak pada periode-periode mendatang. Perbedaan temporer adalah perbedaan waktu pengakuan beban atau pendapatan dalam menghitung penghasilan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan perpajakan. Secara keseluruhan beban atau pendapatan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap periodenya. Perbedaan temporer dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Perbedaan temporer ini akan

¹ Corresponding author

menimbulkan pajak tangguhan yang harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Pajak tangguhan termasuk dalam pembahasan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan yang diatur dalam PSAK No. 46. Penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa pajak tangguhan penting bagi banyak perusahaan. Potterba *et al.* (2011) menunjukkan bahwa sebanyak 35% dari perusahaan sampel mereka melaporkan posisi pajak tangguhan bersih lebih dari 5% dari total aset dan sebanyak 10% dari perusahaan sampel melaporkan posisi pajak tangguhan bersih lebih dari 10% dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa informasi tentang pajak tangguhan penting dan tidak dapat diabaikan para pengguna laporan keuangan. Sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan yang dinyatakan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dapat merefleksikan nilai perusahaan karena menyebabkan beban pajak masa depan menjadi lebih besar atau lebih kecil (PSAK No. 46). Chang *et al.* (2009) menyatakan bahwa penangguhan menunjukkan peningkatan dan penurunan aset dan kewajiban pada neraca, yang merefleksikan penghematan atau peningkatan pajak masa depan. Laux (2013) meneliti keterkaitan aset dan kewajiban pajak tangguhan dengan pajak yang dibayar masa depan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan asimetris antara aset dan kewajiban pajak tangguhan dan pajak yang dibayar masa depan. Beberapa komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan memberikan informasi tentang pajak yang dibayar masa depan dan beberapa komponen yang lain tidak. Hasil ini penting untuk dipahami karena informasi tentang pajak yang dibayar masa depan sangat berguna bagi investor untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan investasi. Keputusan investasi didasarkan pada aliran kas, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi salah satu unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan aliran kas ketika membuat keputusan investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak kini tahun berjalan terhadap beban pajak kini masa depan dan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terdiri atas imbalan pasca kerja (*post employment benefits*), biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*), dan depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*) terhadap beban pajak kini masa depan. Hasil penelitian akan memberikan bukti keterkaitan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan dan beban pajak yang dibayar masa depan, yang dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Beban Pajak Kini

Akuntansi untuk Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam PSAK No. 46. Tujuan dari PSAK No. 46 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan. Penghasilan sebagai objek pajak didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Atas penghasilan tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan (PSAK No. 46).

PSAK No. 46 menjelaskan tentang pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*), yang jumlah agregatnya dicatat sebagai beban pajak (*tax expense*) dalam penghitungan laba rugi satu periode. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aset.

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, selanjutnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal sebagai dasar penghitungan pajak terutang

diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak (laba akuntansi). Koreksi dilakukan terhadap pendapatan dan biaya yang berbeda pengakuannya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal (Wicaksono, 2011).

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Beban pajak kini yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan akan diketahui pada akhir tahun setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan komersial. Oleh karena itu besarnya angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan wajib pajak setiap bulan adalah sebesar pajak terutang tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Penghasilan tahun berjalan diasumsikan sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun. Selisih pajak yang telah dibayarkan dengan pajak sesungguhnya yang harus dibayar wajib pajak akan diakui sebagai pajak kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak kini periode berjalan akan berkaitan dengan beban pajak kini periode selanjutnya.

Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang.

Pengakuan aset atau kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat, berarti bahwa perusahaan pelapor akan dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aset atau pelunasan kewajiban akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian (PSAK No. 46).

Pajak tangguhan terdiri atas aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Berdasarkan PSAK No. 46 kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

- a. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
- b. sisa kompensasi kerugian.

Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- a. perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*); atau

- b. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Chang *et al.* (2009) dan Acaranupong (2010) memberikan bukti bahwa investor menggunakan aset dan kewajiban pajak tangguhan dalam menilai investasi mereka. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan adalah nilai informasi yang relevan. Investor menilai aset pajak tangguhan sebagai penghematan atau manfaat pajak masa depan dan kewajiban pajak tangguhan sebagai pengorbanan pajak masa depan. Laux (2013) mengembangkan variasi empiris Dotan (2003) untuk menguji apakah pajak tangguhan memberikan informasi tambahan tentang pajak yang dibayar masa depan. Analisis menunjukkan ada hubungan asimetris antara pajak tangguhan dan pajak yang dibayar masa depan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari pendapatan dan biaya yang lebih dahulu diakui dalam penghasilan komersial berdasarkan GAAP daripada pengakuan dalam penghasilan fiskal memberikan informasi tentang pajak yang dibayar masa depan. Sebaliknya, aset dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari pendapatan dan biaya yang lebih dahulu diakui dalam penghasilan fiskal daripada diakui dalam penghasilan komersial berdasarkan GAAP tidak memberikan informasi tentang pajak yang dibayar masa depan.

Amir *et al.* (1997) menyatakan bahwa pemisahan pajak tangguhan menjadi komponen-komponennya akan memberikan nilai relevan informasi. Oleh karena itu, aset dan kewajiban pajak tangguhan dipisahkan menjadi beberapa komponen yaitu, imbalan pasca kerja (*post employment benefits*), biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*), dan depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*).

Pengaruh beban pajak kini tahun berjalan terhadap beban pajak kini masa depan

Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Beban pajak kini tahun berjalan dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak pada periode tersebut. Beban pajak kini tahun berjalan merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, namun jumlah ini baru diketahui pada akhir tahun setelah berakhirnya masa pajak. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan setiap bulan diestimasi berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak kemudian dibagi 12. Angsuran Pajak Penghasilan setiap bulan dijadikan sebagai kredit pajak sampai berakhirnya tahun pajak. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak kini periode berjalan berkaitan dengan beban pajak kini periode selanjutnya. Selisih jumlah pajak yang telah dibayarkan dengan beban pajak kini sesungguhnya yang harus dibayar wajib pajak disebut sebagai pajak kurang bayar atau lebih bayar. Berdasarkan PSAK No. 46, jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aset.

Penelitian Laux (2013) menggunakan beban pajak kini sebagai proksi untuk pajak yang dibayar perusahaan pada tahun berjalan. Laux (2013) menyatakan bahwa beban pajak kini tahun berjalan diharapkan berhubungan positif dengan beban pajak kini masa depan pada semua spesifikasi. Dari penjelasan ini, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Beban pajak kini tahun berjalan berpengaruh positif terhadap beban pajak kini masa depan.

Pengaruh aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja terhadap beban pajak kini masa depan

Imbalan pasca kerja adalah imbalan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan ketika karyawan sudah berhenti bekerja. Dalam PSAK No. 46 dijelaskan bahwa imbalan pasca kerja termasuk dalam perbedaan temporer yang boleh dikurangkan yang menimbulkan aset pajak tangguhan. Termasuk dalam imbalan pasca kerja adalah biaya manfaat pensiun (*retirement benefit cost*), yaitu imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Biaya atas imbalan pasca kerja dapat dikurangkan dalam penghitungan laba akuntansi, tetapi baru dapat dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut dibayar oleh perusahaan. Akuntansi komersial mengakui biaya pada waktu pencadangan, sedangkan

akuntansi fiskal mengakui biaya pada waktu terjadi pensiun. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan menimbulkan aset pajak tangguhan karena manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun dibayar (PSAK No. 46).

Laux (2013) mengkategorikan imbalan pasca kerja ke dalam aset pajak tangguhan yang timbul dari biaya yang telah diakui dalam penghasilan komersial namun belum diakui dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak pada saat biaya dibayarkan kepada pekerja di masa depan. Oleh karena itu, biaya atas imbalan pasca kerja akan mengakibatkan beban pajak kini masa depan menjadi lebih rendah atau menghemat pembayaran pajak di masa depan. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja berpengaruh negatif terhadap beban pajak kini masa depan.

Pengaruh aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar terhadap beban pajak kini masa depan

Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang telah dicadangkan dan diakui dalam laporan keuangan komersial, namun belum diakui dalam laporan keuangan fiskal sampai biaya tersebut benar-benar dibayarkan. Sesuai dengan SFAS No. 109 paragraf 11, biaya yang masih harus dibayar termasuk dalam kelompok biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expenses*) setelah diakui dalam penghasilan keuangan. Misalnya suatu kewajiban garansi diakui sebagai biaya yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan (*deductible*) ketika kewajiban garansi dibayarkan.

Laux (2013) menjelaskan bahwa untuk tujuan pelaporan keuangan, pada saat perusahaan mengakui pendapatan penjualan, pada saat yang sama perusahaan juga mengestimasi biaya garansi masa depan. Sedangkan untuk tujuan pajak yang menggunakan basis kas, perusahaan tidak dapat memotong biaya garansi sampai kewajiban tersebut diselesaikan. Misalnya, perusahaan akan menerima manfaat pajak sebesar \$200 ketika kewajiban garansi sebesar \$500 diselesaikan. Pada saat mengakui biaya garansi sebesar \$500 pada penghasilan keuangan, perusahaan akan mencatat aset pajak tangguhan sebesar \$200 pada neraca dan manfaat pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Aset pajak tangguhan akan membalik pada tahun perusahaan melakukan pembayaran tunai untuk menyelesaikan kewajiban garansi. Biaya garansi tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak masa depan, sehingga akan menghemat pembayaran pajak masa depan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar berpengaruh negatif terhadap beban pajak kini masa depan.

Pengaruh kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat terhadap beban pajak kini masa depan

Depresiasi dipercepat adalah biaya depresiasi yang telah dikurangkan lebih dahulu untuk tujuan pajak daripada didepresiasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Biaya ini termasuk dalam perbedaan temporer yang menimbulkan kewajiban pajak tangguhan karena mengakibatkan penghasilan fiskal lebih rendah dari penghasilan komersial. Sesuai penjelasan dari PSAK No. 46, contoh perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, misalnya: penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba fiskal mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba akuntansi. Perbedaan temporer adalah selisih antara nilai tercatat aset tetap dengan DPP-nya. DPP aset tetap adalah sebesar harga perolehan dikurangi seluruh pengurangan yang diperkenankan oleh peraturan perundangan perpajakan dalam penghitungan fiskal. Perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan, apabila penyusutan menurut pajak menggunakan metode dipercepat (*accelerated*) (PSAK No. 46).

Laux (2013) memberikan contoh pada penyusutan pajak dipercepat (*accelerated depreciation*), yaitu ketika suatu aset didepresiasi untuk tujuan pajak (*tax depreciation*) lebih cepat dari tujuan pelaporan keuangan (*book depreciation*). Misalnya, total pemotongan hutang pajak kini untuk penyusutan setiap aset \$4,800 ($\$12,000 \times 40$ persen), yang akan diwujudkan selama dua tahun

pertama (\$2400 per tahun) untuk tujuan pajak, dan selama tiga tahun (\$1.600 per tahun) untuk tujuan komersial sesuai dengan GAAP. Berdasarkan ASC 740, perusahaan menangguhkan pengakuan \$800 manfaat pajak di masing-masing dua tahun pertama setelah aset tersebut ditempatkan dalam pelayanan dengan mengakui kewajiban pajak tangguhan pada neraca dan beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Pada tahun ketiga ketika kewajiban pajak tangguhan membalik, beban pajak komersial akan menjadi lebih besar, namun hal ini tidak berdampak pada arus kas (Laux, 2013). Hariani (2005) menyatakan bahwa kewajiban pajak tangguhan menunjukkan pengorbanan di masa depan. Laba kena pajak dan laba yang ditangguhkan di periode mendatang akan timbul dari kejadian yang telah terjadi. Pembayaran pajak pada saat jatuh tempo adalah pengorbanan di masa depan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat berpengaruh positif terhadap beban pajak kini masa depan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah beban pajak kini masa depan yaitu, beban pajak kini pada periode masa depan yang dilaporkan pada laporan laba rugi perusahaan. Beban pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, selanjutnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi). Sesuai dengan penelitian Laux (2013), variabel dependen diukur dengan membagi beban pajak kini dengan rata-rata total aset. Beban pajak kini masa depan dihitung selama periode 3 tahun yaitu $t+1$, $t+2$, dan $t+3$, karena banyak komponen pajak tangguhan memerlukan waktu beberapa tahun sebelum efek pajak mereka direalisasikan (Laux, 2013).

Variabel independen terdiri atas beban pajak kini (*current tax*) pada tahun berjalan dan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terdiri atas imbalan pasca kerja (*post employment benefits*), biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*), dan depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*). Beban pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Pajak kini merupakan jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Imbalan pasca kerja (*post employment benefits*) adalah imbalan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan ketika karyawan sudah berhenti bekerja. Imbalan pasca kerja termasuk dalam perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) yang menimbulkan aset pajak tangguhan. Biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*) adalah biaya yang merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya namun belum dibayarkan perusahaan, sehingga masih merupakan kewajiban yang harus ditanggung perusahaan. Biaya ini termasuk dalam perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) yang menimbulkan aset pajak tangguhan. Depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*) dimana depresiasi berdasarkan fiskal lebih cepat daripada didepresiasi berdasarkan komersial. Depresiasi dipercepat termasuk dalam perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) yang akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Variabel independen diukur berdasarkan referensi dari penelitian Laux (2013), dengan membagi seluruh variabel dengan rata-rata total aset pada tahun tersebut.

Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah semua perusahaan manufaktur dalam berbagai industri yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian adalah 88 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2005-2011 yang dipilih dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu metode pemilihan populasi sesuai dengan kriteria sampel yang diperlukan dalam penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini dipilih dimana perusahaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Menyajikan akun aset dan/ atau kewajiban

pajak tangguhan di laporan keuangan pada tahun 2005-2008; (2) Menyajikan akun beban pajak kini di laporan keuangan pada tahun 2005-2011; (3) Menyajikan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang terdiri atas imbalan pasca kerja, biaya yang masih harus dibayar, dan depresiasi dengan metode dipercepat; (4) menggunakan satuan mata uang rupiah.

Metode Analisis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan metode analisis regresi *time series* karena data penelitian yang dikumpulkan berasal dari data perusahaan yang sama dalam beberapa periode waktu yang berurutan. Terdapat 3 model regresi yang digunakan karena beban pajak kini masa depan dianalisis selama periode 3 tahun ke depan. Model regresi yang digunakan adalah:

Persamaan 1:

$$PKMD_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 PK_t + \beta_2 APT_IPK_t + \beta_3 APT_BiayaYMHD_t + \beta_4 KPT_DEP_t + \varepsilon \quad (3.1)$$

Persamaan 2:

$$PKMD_{t+2} = \beta_0 + \beta_1 PK_t + \beta_2 APT_IPK_t + \beta_3 APT_BiayaYMHD_t + \beta_4 KPT_DEP_t + \varepsilon \quad (3.2)$$

Persamaan 3:

$$PKMD_{t+3} = \beta_0 + \beta_1 PK_t + \beta_2 APT_IPK_t + \beta_3 APT_BiayaYMHD_t + \beta_4 KPT_DEP_t + \varepsilon \quad (3.3)$$

Keterangan:

β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
$PKMD_{t+n}$	= Beban pajak kini masa depan ($n = 1, 2, 3$)
PK_t	= Beban pajak kini tahun t
APT_IPK_t	= Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja
$APT_BiayaYMHD_t$	= Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar
KPT_DEP_t	= Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi
t	= Tahun
ε	= Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Tabel 1
Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2011	119
2.	Perusahaan yang mengalami <i>delisting</i> dari BEI selama tahun 2005-2011	16
3.	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap	65
4.	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing, selain Rupiah	9
5.	<i>Outlier</i>	7
Jumlah		22

Dari data yang terlihat dari Tabel 1 diketahui bahwa jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2011 yang menjadi populasi penelitian adalah sebanyak 119 perusahaan. Perusahaan yang tidak sesuai kriteria karena mengalami *delisting* sebanyak 16 perusahaan. Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap sebanyak 65 perusahaan. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing, selain Rupiah sebanyak 9 perusahaan. Perusahaan yang memiliki data *outlier* yaitu data yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai

ekstrim sebanyak 7 perusahaan. Jumlah akhir dari sampel penelitian adalah sebanyak 22 perusahaan.

Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PKt	88	.0000815	.0584281	.010456550	.0122279151
APT_IPKt	88	.0000953	.0174231	.002188222	.0030788375
APT_BiayaYMHDt	88	.0000031	.0038657	.000824933	.0008730574
KPT_DEPt	88	.0000015	.0248639	.004140855	.0053985837
PKMDt+1	88	.0002457	.0584281	.012709160	.0147498562
PKMDt+2	88	.0003418	.0828615	.015591976	.0182460265
PKMDt+3	88	.0003882	.0923280	.018060789	.0209561198
Valid N (listwise)	88				

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2015

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas diketahui bahwa jumlah total sampel perusahaan adalah sebanyak 88 perusahaan. Variabel independen terdiri atas beban pajak kini tahun t (PKt), aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja tahun t (APT_IPKt), aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar tahun t (APT_BiayaYMHDt), dan kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi pada tahun t (KPT_DEPt). Variabel dependen adalah beban pajak kini masa depan (PKMD) t+1, t+2, dan t+3. Semua variabel telah dibagi dengan rata-rata total aset perusahaan.

Beban pajak kini tahun t (PKt) memiliki nilai terkecil 0,0000815 dan nilai terbesar 0,0584281. Perusahaan yang memiliki nilai terendah adalah PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (2005), sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi adalah PT Astra Otoparts Tbk. (2008). Beban pajak kini tahun t memiliki nilai rata-rata 0,010456550 dan standar deviasi 0,0122279151. Hal ini menunjukkan simpangan data penelitian sebesar 1,22%.

Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja (APT_IPKt) memiliki rentang nilai antara 0,0000953 sampai dengan 0,0174231. Perusahaan yang memiliki nilai terendah adalah PT Siantar Top Tbk. (2006), sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (2006). Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja memiliki nilai rata-rata 0,002188222 dan standar deviasi 0,0030788375. Hal ini menunjukkan bahwa simpangan data penelitian cukup rendah yaitu sebesar 0,31%.

Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar (APT_BiayaYMHDt) memiliki nilai terendah 0,0000031 yaitu PT Pyridam Farma Tbk (2007) dan nilai tertinggi 0,0038657 yaitu PT Mayora Indah Tbk (2006). Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar memiliki nilai rata-rata 0,000824933 dan standar deviasi 0,0008730574. Hal ini menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar cukup rendah dan simpangan data penelitian juga rendah yaitu sebesar 0,09%.

Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat (KPT_DEPt) memiliki nilai terendah 0,0000015 dan nilai tertinggi 0,0248639. Perusahaan yang memiliki nilai terendah adalah PT Pyridam Farma Tbk. (2007), sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi adalah PT Mayora Indah Tbk. (2005). Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat memiliki nilai rata-rata 0,004140855 dan standar deviasi 0,0053985837. Hal ini menunjukkan simpangan data penelitian cukup rendah yaitu sebesar 0,54%.

Beban pajak kini masa depan (PKMD) $t+1$ memiliki nilai terendah 0,0002457 yaitu PT Ricky Putra Globalindo Tbk. dan nilai terbesar 0,0584281 yaitu PT Astra Otoparts Tbk. Beban pajak kini masa depan $t+1$ memiliki nilai rata-rata 0,012709160 dan standar deviasi 0,0147498562. Beban pajak kini masa depan $t+2$ memiliki rentang nilai antara 0,0003418 sampai dengan 0,0828615. Perusahaan yang memiliki nilai terendah adalah PT Ricky Putra Globalindo Tbk. dan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi adalah PT Astra Otoparts Tbk. Beban pajak kini masa depan $t+2$ memiliki nilai rata-rata 0,015591976 dan standar deviasi 0,0182460265. Beban pajak kini masa depan $t+3$ memiliki nilai terendah 0,0003882 yaitu PT Ricky Putra Globalindo Tbk. dan nilai tertinggi 0,0923280 yaitu PT Astra Otoparts Tbk. Beban pajak kini masa depan $t+3$ memiliki nilai rata-rata 0,018060789 dan standar deviasi 0,0209561198.

Pembahasan Hasil Regresi

Hasil uji statistik t untuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 disajikan dalam Tabel 3. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh beban pajak kini tahun berjalan, aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja, aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar, dan kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat terhadap beban pajak kini masa depan.

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Persamaan 1		Persamaan 2		Persamaan 2	
	t	Sign.	t	Sign.	t	Sign.
(Constant)	7.366	.000	6.776	.000	.151	.880
PKt	15.075	.000	15.305	.000	17.047	.000
APT_IPKt	-3.778	.000	-5.211	.000	-5.254	.000
APT_BiayaYMHDt	-.131	.896	.008	.994	-.063	.950
KPT_DEPt	3.228	.002	4.093	.000	3.467	.001

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2015

Beban pajak kini merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayar dan dihitung sendiri oleh wajib pajak pada tahun berjalan. Penghasilan kena pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan terutang diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap penghasilan sebelum pajak komersial. Beban pajak kini tahun berjalan adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak pada satu periode dikalikan tarif pajak.

Hipotesis 1 menyatakan bahwa beban pajak kini tahun berjalan berpengaruh positif terhadap beban pajak kini masa depan. Berdasarkan hasil pengujian regresi persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, untuk beban pajak kini masa depan pada $t+1$, $t+2$, dan $t+3$ berturut-turut selama 3 tahun, diperoleh hasil yang signifikan. Hal ini dibuktikan pada hasil uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) untuk beban pajak kini tahun t diperoleh nilai signifikansi 0,000 dari ketiga persamaan. Koefisien parameter dari ketiga persamaan bernilai positif, yang artinya terdapat hubungan searah antara beban pajak kini tahun t dengan beban pajak kini masa depan. Oleh karena itu hipotesis 1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa beban pajak kini tahun berjalan berpengaruh positif terhadap beban pajak kini masa depan. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Laux (2013) yang menyatakan bahwa beban pajak yang dibayar pada tahun t , berhubungan positif terhadap beban pajak yang dibayar masa depan dalam semua spesifikasi.

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja berpengaruh positif terhadap beban pajak kini masa depan. Dari uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) diperoleh hasil yang signifikan, yaitu dengan nilai signifikansi 0,000 dari ketiga persamaan regresi pada $t+1$, $t+2$, dan $t+3$. Koefisien parameter dari ketiga persamaan bernilai negatif, yang artinya imbalan pasca kerja berhubungan terbalik dengan beban pajak kini

masa depan. Hal ini berarti hipotesis 2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja berpengaruh secara positif terhadap beban pajak kini masa depan.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Laux (2013) yang mengkategorikan imbalan pasca kerja ke dalam komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui dalam penghasilan komersial lebih dahulu daripada fiskal. Imbalan pasca kerja akan diakui dalam penghasilan kena pajak pada saat perusahaan membayarkan imbalan tersebut kepada karyawan di periode masa depan. Laux (2013) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja akan membalik pada tahun perusahaan membuat pembayaran tunai, dan pembayaran tunai akan mengakibatkan pemotongan pajak penghasilan. Jadi pada saat pemulihan di masa depan, imbalan pasca kerja dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak yang akan menghemat beban pajak kini depan. Oleh karena itu dapat disimpulkan aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja berpengaruh secara negatif terhadap beban pajak kini masa depan, karena menyebabkan beban pajak kini masa depan menjadi lebih rendah. Chang *et al.* (2009) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan pada neraca secara positif dan signifikan terkait dengan nilai perusahaan. Aset pajak tangguhan dipahami sebagai aset perusahaan yang menunjukkan penghematan pajak masa depan.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar berpengaruh negatif terhadap beban pajak kini masa depan. Hasil uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) pada t+1, t+2, dan t+3 menunjukkan hasil yang tidak signifikan dari ketiga persamaan. Dari hasil uji tersebut maka hipotesis 3 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa biaya yang masih harus dibayar tidak berpengaruh terhadap beban pajak kini masa depan selama periode 3 tahun ke depan.

Koefisien regresi pada t+2 bertanda positif, berbeda dengan hasil pada t+1 dan t+3 yang berkoefisien negatif. Hal ini disebabkan pada tahun t+2 banyak biaya yang tidak terealisasi. Hasil ini didukung data penelitian pada beberapa perusahaan sampel yaitu PT Berlina Tbk., PT Central Proteina Prima Tbk., PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk., PT Lionmesh Prima Tbk., PT Ricky Putra Globaindo Tbk., PT Siantar Top Tbk., dan PT Tunas Baru Lampung Tbk. Pada perusahaan-perusahaan tersebut biaya yang masih harus dibayar mempunyai nilai yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa biaya yang telah dicadangkan pada tahun sebelumnya tidak terealisasi sehingga perusahaan tidak membentuk cadangan biaya pada tahun tersebut.

Laux (2013) menyatakan bahwa untuk komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui dalam penghasilan komersial lebih dahulu daripada fiskal, waktu pembalikan mempengaruhi waktu pembayaran pajak masa depan. Biaya yang masih harus dibayar akan membalik pada tahun perusahaan membuat pembayaran tunai karena pembayaran tunai akan mengakibatkan pemotongan pajak penghasilan. Dari hasil uji statistik, biaya yang masih harus dibayar tidak berpengaruh terhadap beban pajak kini masa depan karena kemungkinan biaya tersebut tidak terealisasi selama periode 3 tahun. Oleh sebab itu aset pajak tangguhan tidak membalik, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap beban pajak kini masa depan pada periode t+1, t+2, dan t+3.

Hasil uji ini sesuai dengan penelitian Rachmawati (2010) yang menguji kemampuan dekomposisi pajak tangguhan untuk memprediksikan arus kas masa depan. Aset pajak tangguhan lain yang terdiri atas penurunan nilai piutang dan pencadangan keusangan nilai persediaan tidak berpengaruh terhadap arus kas operasional. Ini menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan lain tidak memberikan dampak terhadap penghematan beban pajak, karena aset pajak tangguhan tidak dapat direalisasi pada satu periode ke depan.

Hipotesis 4 menyatakan bahwa aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar berpengaruh positif terhadap beban pajak kini masa depan. Hasil uji signifikansi individual (uji statistik t) dari ketiga persamaan pada t+1, t+2, dan t+3 menunjukkan hasil yang signifikan. Koefisien parameter bertanda positif, artinya kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi berhubungan searah dengan beban pajak kini masa depan. Berdasarkan hasil uji tersebut, hipotesis 4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi berpengaruh secara positif terhadap beban pajak kini masa depan. Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi akan menambah beban pajak kini masa depan.

Hasil uji mendukung penelitian sebelumnya oleh Hariani (2005) yang menyatakan bahwa penurunan laba bersih pada tahun berjalan disebabkan karena kenaikan kewajiban pajak tangguhan lebih besar daripada kenaikan aset pajak tangguhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun

tersebut laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal. Tetapi, ketika kewajiban pajak tangguhan terealisasi di masa depan, laba fiskal akan menjadi lebih besar. Ini mengakibatkan pajak penghasilan terutang atau beban pajak kini masa depan juga lebih besar (Hariani, 2005).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak kini tahun berjalan dan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan. Variabel independen terdiri atas beban pajak kini tahun t , aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja, aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar, dan kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi. Variabel dependen adalah beban pajak kini masa depan pada $t+1$, $t+2$, dan $t+3$. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi.

Berdasarkan hasil analisis regresi *time series* diketahui hasil uji statistik F dari ketiga persamaan pada $t+1$, $t+2$, dan $t+3$ didapat nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nilai signifikansi ketiga persamaan 0,000 kurang dari α 0,05. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen dari ketiga persamaan, beban pajak kini tahun t , aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja dan biaya yang masih harus dibayar, serta kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi berpengaruh terhadap beban pajak kini masa depan pada $t+1$, $t+2$, dan $t+3$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi beban pajak kini masa depan.

Hasil uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dari ketiga persamaan pada $t+1$, $t+2$, dan $t+3$, secara konsisten terdapat 3 variabel yang berpengaruh terhadap beban pajak kini masa depan, yaitu beban pajak kini tahun t , aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja, dan kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dengan nilai signifikansi dibawah α 0,05. Sedangkan biaya yang masih harus dibayar tidak berpengaruh terhadap beban pajak kini masa depan pada $t+1$, $t+2$, dan $t+3$ karena tingkat signifikansi lebih besar dari α 0,05.

Beban pajak kini tahun berjalan berpengaruh secara positif terhadap beban pajak kini masa depan, karena beban pajak kini tahun t dijadikan estimasi untuk menghitung angsuran beban pajak kini pada tahun selanjutnya. Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja berpengaruh secara negatif terhadap beban pajak kini masa depan, karena pada saat imbalan pasca kerja terealisasi, imbalan pasca kerja akan dikurangkan dalam penghasilan kena pajak yang menyebabkan beban pajak kini masa depan menjadi lebih rendah atau menghemat pajak masa depan. Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar tidak berpengaruh terhadap beban pajak kini masa depan karena tidak signifikan secara statistik. Biaya yang masih harus dibayar kemungkinan tidak terealisasi dalam waktu 3 tahun, sehingga aset pajak tangguhan tidak terpulihkan. Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat berpengaruh secara positif terhadap beban pajak kini masa depan, karena pada saat kewajiban dibayarkan beban pajak kini masa depan menjadi lebih besar atau menambah pajak masa depan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pengaruh komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan, terdapat beberapa kelemahan dan keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah sebagian besar perusahaan hanya menyajikan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang dianggap material, sehingga data berbeda dan tidak konsisten antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Data komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk beberapa item juga kurang memadai, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan pengaruhnya terhadap beban pajak kini masa depan. Selain itu, penelitian ini hanya mengetahui hubungan antara komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan dan beban pajak kini masa depan, sehingga belum menggambarkan pengaruh sesungguhnya terhadap arus kas operasi perusahaan di masa depan terkait dengan pembayaran pajak. Dalam penelitian ini, beban pajak kini masa depan seharusnya diuji selama 5 tahun ke depan, namun karena terdapat masalah statistik yaitu tidak memenuhi asumsi non-autokorelasi pada tahun ke empat dan lima, maka penelitian hanya dilakukan selama 3 tahun ke depan. Kemungkinan besar banyak komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang tidak membalik selama periode tersebut.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel penelitian dari seluruh sektor, sehingga akan lebih menggambarkan pengaruhnya terhadap seluruh perusahaan secara umum. Penelitian selanjutnya sebaiknya juga menggunakan data beban pajak kini masa depan lebih

dari 3 tahun, karena banyak komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang membalik dalam jangka panjang. Selain menguji pengaruhnya terhadap beban pajak kini masa depan, sebaiknya penelitian selanjutnya juga menguji pengaruhnya terhadap arus kas operasi masa depan, sehingga mengetahui pengaruh sesungguhnya terhadap arus kas operasi yang dikeluarkan perusahaan di masa depan terkait dengan pembayaran pajak.

REFERENSI

- Acaranupong, K. 2010. "Value Relevance and Components of Deferred Tax Assets and Liabilities: Evidence from the Listed Companies on SET 100 in Thailand." *Asian Journal of Business and Accounting*, Vol. 3, No. 1, pp. 55-88.
- Agoes, S dan E. Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amir, E., M. Kirschenheiter, and K. Willard. 1997. "The Valuation of Deferred Taxes". *Contemporary Accounting Research*, Vol. 14, No. 4, pp. 597-622.
- Chang, C., K. Herbohm, dan I. Tutticci. 2009. "Market's Perception of Deferred Tax Accruals." *Accounting and Finance*, Vol 49, pp. 645-673.
- Dotan, A. 2003. "On the Value of Deferred Taxes." *Asian Pacific Journal of Accounting and Economics*, Vol. 10, No. 2, pp. 173-186.
- Dyreng, S., M. Hanlon, and E. Maydew. 2008. "Long-run Corporate Tax Avoidance." *The Accounting Review*, Vol. 83, No. 1, pp. 61-82.
- Financial Accounting Standard Board. 1992. "Accounting for Income Taxes: Statement of Financial Accounting Standards No. 109". Financial Accounting Standard Board of the Financial Accounting Foundation.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Graham, J., J. Raedy, and D. Shackelford. 2011. "Research in Accounting for Income Taxes." *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 53, pp. 412-434.
- Hamzah, A. 2011. "Daya prediksi Pajak, Laba dan Arus Kas Terhadap Pajak Masa Depan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". *ISSN*, Vol. 15, No. 3, pp. 291-306.
- Hanlon, M. 2005. "The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences". *The Accounting Review*, Vol. 80 No. 1, pp. 137-166.
- Hariani, D. 2005. "Analisis Dampak Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Laba Bersih Perusahaan." *Disertasi*, Universitas Widyatama.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 1998. "Akuntansi Pajak Penghasilan: Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46". Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2002. *Akuntansi Intermediate*. 10th ed. Jakarta: Erlangga.
- Kiswara, E. 2011. "Nilai Relevan dan Rekwajiban Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi menurut SFAC No. 2 dalam Penyajian Laporan Keuangan dengan Metode-metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda." *Disertasi*, Universitas Diponegoro.



- Laux, R., C. 2013. "The Association between Deferred Tax Assets and Liabilities and Future Tax Payments". *The Accounting Review*, Vol. 88, No. 4, pp. 1357-1383.
- Lundholm, R., J. 2001. Discussion of: "On the Aggregation and Valuation of Deferred Taxes". *Review of Accounting Studies*, Vol. 6, pp 299-304.
- Neuman, W., L. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 7th ed. Indeks.
- Poterba, J., N. Rao, and J. Seidman. 2011. "Deferred Tax Positions and Incentives for Corporate Behavior Around Corporate Tax Changes". *National Tax Journal*, Vol. 64, No. 1, pp. 27–58.
- Rachmawati, D. 2010. "Kemampuan Dekomposisi Pajak Tangguhan untuk Memprediksi Arus Kas." *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol. 2, No. 2, pp. 117-138.
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. 2013. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. 4 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, K.R. dan J. Wild. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tenaya, A.I. 2007. "Decision Usefulness: Trade-off Antara Reliability dan Relevance". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. 10th ed. Jakarta: Salemba Empat.